



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Nomor 3, Km. 5. Telp (0254) 214085 Kota Serang, Banten 42123
www.ptun-serang.go.id, e-mail: informasi@ptun-serang.go.id

Nomor : 596 /KPTUN.W2-TUN3/RA1.8/V/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi
Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Serang, // Mei 2026

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
di -
Jalan Cikini Raya Nomor 117 Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai bentuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja organisasi serta implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Laporan dimaksud memuat hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja kepaniteraan dan kesekretariatan, pelaksanaan anggaran, capaian IKPA dan NKPA, pelayanan publik, serta tindak lanjut dan rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas kinerja organisasi.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk menjadi bahan monitoring dan evaluasi. Atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.



Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.

NIP. 19760126 200212 1 004

Tembusan :

- Arsip.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Nomor 3, Km. 5. Telp (0254) 214085 Kota Serang, Banten 42123
www.ptun-serang.go.id, e-mail: informasi@ptun-serang.go.id

Nomor : 596/SEK.PTUN.W2-TUN3/RA1.8/V/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi
Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Serang, 11 Mei 2026

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
di -
Serang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, bersama ini kami sampaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, serta capaian kinerja organisasi.

Laporan dimaksud memuat hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja kepaniteraan dan kesekretariatan, pelaksanaan anggaran, capaian IKPA dan NKPA, pelayanan publik, serta analisis permasalahan, hambatan, dan tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka peningkatan kinerja organisasi pada triwulan berikutnya.

Demikian surat pengantar ini disampaikan. Atas perhatian dan arahannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris,
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



TAUFIK RAHMAN, S.Sos., M.M.
N IP. 19780509 200604 1 002

Tembusan :

- Arsip.



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTORAT JENDERAL
BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

TRIWULAN I TAHUN 2026

PENGADILAN TATAUSAHA NEGARA SERANG



Jl. Syech Nawawi Albantani No 3
Km.5 Banjarsari Cipocck Jawa
Kota Serang 42123



www.ptun-serang.go.id



(0254) 214085

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja organisasi selama Triwulan I Tahun 2026, baik pada unsur kepaniteraan maupun kesekretariatan. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam rangka mendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Melalui laporan ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai tingkat capaian indikator kinerja, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, kualitas pelaksanaan anggaran, serta berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi selama periode Triwulan I Tahun 2026. Selain itu, laporan ini juga menjadi bahan evaluasi dan dasar pengambilan langkah tindak lanjut dalam rangka peningkatan kinerja organisasi pada triwulan berikutnya.

Secara umum hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 telah berjalan dengan baik. Mayoritas indikator kinerja berhasil mencapai target yang ditetapkan, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan optimalisasi, khususnya pada capaian kinerja perencanaan anggaran dan efektivitas rincian output.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja ini sehingga laporan dapat tersusun dengan baik.

Serang, 30 April 2026

Tim Akuntabilitas PTUN Serang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Ruang Lingkup	2
BAB II GAMBARAN UMUM KINERJA ORGANISASI	
A. Sasaran Strategis	3
B. Pendekatan Monitoring dan Evaluasi	3
C. Metode Evaluasi	4
BAB III HASIL MONITORING DAN EVALUASI KINERJA	
A. Kinerja Kepaniteraan	5
B. Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	6
C. Kinerja Kesekretariatan	7
BAB IV ANALISIS CAPAIAN KINERJA	
A. Analisis Efektivitas Kinerja	9
B. Analisis Efisiensi Kinerja	9
C. Analisis Kualitas Pelaksanaan Anggaran	10
D. Analisis Kinerja Kepaniteraan	11
E. Analisis Kepuasan dan Kepercayaan Publik	12
F. Analisis Pengelolaan BMN dan IPA	12
G. Analisis Tren Capaian Kinerja Triwulan I	13
H. Analisis Risiko Kinerja	13
I. Analisis Prospek Capaian Triwulan II	14

BAB V PERMASALAHAN, HAMBATAN, TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI

A. Permasalahan dan Hambatan	15
B. Upaya Perbaikan dan Strategi Penguatan Kinerja	18
C. Rencana Aksi Triwulan II	18

BAB VI PENUTUP

Kesimpulan	20
------------------	----

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan sistem pengendalian dan evaluasi kinerja yang mampu memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu bentuk implementasi pengendalian tersebut dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai bagian dari badan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program, kegiatan, serta penggunaan anggaran negara. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat ketercapaian target kinerja, mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kegiatan, serta merumuskan langkah tindak lanjut perbaikan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Triwulan I Tahun 2026 difokuskan pada pengukuran capaian indikator kinerja utama dan indikator pendukung yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026, baik pada unsur kepaniteraan maupun kesekretariatan.

Selain itu, monitoring juga dilakukan terhadap capaian pelaksanaan anggaran melalui indikator IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) dan NKPA (Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran), sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan efektivitas pelaksanaan program.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri PANRB tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA dan NKPA.
6. Perjanjian Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2026.

C. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Laporan ini disusun sebagai media monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja organisasi selama Triwulan I Tahun 2026.

b. Tujuan

1. Mengetahui tingkat capaian kinerja organisasi.
2. Mengetahui efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan pelaksanaan kegiatan.
4. Menyusun langkah tindak lanjut perbaikan kinerja.
5. Menjadi dasar pengambilan keputusan pimpinan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup monitoring dan evaluasi meliputi:

1. Kinerja Kepaniteraan;
2. Kinerja Kesekretariatan;
3. Pelaksanaan Anggaran dan IKPA;
4. Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA);
5. Pengelolaan BMN dan IPA;
6. Pelayanan publik dan kepuasan masyarakat.

BAB II

GAMBARAN UMUM KINERJA ORGANISASI

A. Sasaran Strategis

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi mengacu pada sasaran strategis organisasi sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern.
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

B. Pendekatan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja pada Triwulan I Tahun 2026.

Evaluasi dilakukan terhadap:

- a. Efektivitas pencapaian indikator;
- b. Kualitas pelaksanaan anggaran;
- c. Kualitas perencanaan anggaran;
- d. Kualitas layanan publik;
- e. Efektivitas pengelolaan bmn;
- f. Faktor penghambat dan tindak lanjut.

C. Metode Evaluasi

Metode evaluasi dilakukan melalui:

1. Pengumpulan data capaian kinerja;
2. Analisis target dan realisasi;
3. Analisis tren capaian bulanan;
4. Analisis efektivitas dan efisiensi;
5. Identifikasi hambatan;
6. Penyusunan rekomendasi.

BAB III

HASIL MONITORING DAN EVALUASI KINERJA

A. Kinerja Kepaniteraan

1. Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

Target indikator sebesar 91% dengan realisasi rata-rata Triwulan I sebesar 91,58%.

Realisasi bulanan:

- a. Januari : 100%
- b. Februari : 50%
- c. Maret : 100%

Analisis: Fluktuasi capaian pada bulan Februari disebabkan oleh adanya perkara yang belum dapat diselesaikan tepat waktu pada periode pelaporan. Namun demikian, secara kumulatif capaian Triwulan I tetap melampaui target tahunan.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan perkara secara umum telah berjalan efektif, meskipun masih diperlukan penguatan monitoring terhadap penyelesaian perkara pada periode tertentu untuk menjaga konsistensi capaian.

2. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu

Target indikator sebesar 100% dengan realisasi Triwulan I sebesar 100%.

Analisis: Seluruh salinan putusan berhasil disampaikan tepat waktu kepada para pihak. Capaian ini menunjukkan efektivitas administrasi perkara dan optimalisasi koordinasi internal kepaniteraan.

3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Amar Putusan Tepat Waktu

Target indikator sebesar 100% dengan realisasi Triwulan I sebesar 100%.

Analisis: Capaian ini menunjukkan konsistensi pelaksanaan administrasi perkara serta kepatuhan terhadap standar pelayanan peradilan.

4. Persentase Putusan yang Diunggah pada Direktori Putusan

Target indikator sebesar 100% dengan realisasi Triwulan I sebesar 100%.

Analisis: Seluruh putusan telah berhasil diunggah pada direktori putusan secara tepat waktu sehingga mendukung transparansi layanan peradilan dan keterbukaan informasi publik.

5. Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi

Pada Triwulan I tidak terdapat permohonan eksekusi sehingga indikator tidak dapat diukur.

Analisis: Tidak adanya data realisasi bukan menunjukkan kegagalan capaian, melainkan karena tidak terdapat objek pengukuran pada periode berjalan.

6. Persentase Penggunaan e-Court

Target indikator sebesar 100% dengan realisasi Triwulan I sebesar 100%.

Analisis: Seluruh perkara telah menggunakan layanan e-Court. Hal ini menunjukkan keberhasilan implementasi digitalisasi layanan peradilan dan meningkatnya adaptasi pengguna layanan terhadap sistem elektronik.

B. Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Target indikator sebesar 98 dengan realisasi sebesar 101,48.

Analisis: Nilai IKM yang melampaui target menunjukkan kualitas pelayanan publik berada pada kategori sangat baik. Faktor yang mempengaruhi capaian antara lain:

- a. Pelayanan administrasi yang responsif;
- b. Penggunaan layanan berbasis elektronik;
- c. Peningkatan kualitas sarana pelayanan;
- d. Budaya pelayanan prima.

2. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

Realisasi IPAK sebesar 100.

Analisis: Capaian ini menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas layanan pengadilan serta efektivitas implementasi pembangunan Zona Integritas dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

C. Kinerja Kesekretariatan

1. Nilai IKPA DIPA 01

Target sebesar 96 dengan realisasi sebesar 95,63.

Komponen pendukung:

- | | |
|-----------------------------|----------|
| a. Revisi DIPA | : 100; |
| b. Deviasi Halaman III DIPA | : 100; |
| c. Penyerapan Anggaran | : 100; |
| d. Belanja Kontraktual | : 100; |
| e. Penyelesaian Tagihan | : 100; |
| f. Pengelolaan UP/TUP | : 100; |
| g. Capaian Output | : 82,50. |

Analisis: Nilai IKPA menunjukkan kualitas pelaksanaan anggaran berada pada kategori sangat baik. Hal ini didukung oleh efektivitas pengelolaan administrasi keuangan dan pengendalian pelaksanaan anggaran.

2. Nilai IKPA DIPA 05

Target sebesar 95 dengan realisasi sebesar 94,68.

Analisis: Capaian IKPA DIPA 05 juga menunjukkan kinerja sangat baik meskipun capaian output masih memerlukan optimalisasi.

3. Nilai NKPA DIPA 01

Target sebesar 96 dengan realisasi sebesar 37,50.

Analisis: Rendahnya nilai NKPA pada awal tahun dipengaruhi oleh:

- a. Capaian rincian output yang masih bertahap;
- b. Efisiensi SBK yang belum terbentuk;
- c. Sebagian kegiatan masih dalam tahap persiapan pelaksanaan.

Berdasarkan PER-5/PB/2024, komponen NKPA dipengaruhi oleh aspek efektivitas dan efisiensi. Pada Triwulan I, penilaian masih bersifat progres awal sehingga belum mencerminkan capaian akhir tahun.

4. Nilai NKPA DIPA 05

Target sebesar 91 dengan realisasi sebesar 14,79.

Analisis: Nilai ini dipengaruhi rendahnya capaian Rincian Output (RO) pada awal tahun anggaran serta belum terbentuknya efisiensi SBK.

Namun demikian, status penilaian masih berada pada kategori “Tahap Akumulasi Progres Berkelanjutan”, sehingga masih terdapat peluang peningkatan signifikan pada triwulan berikutnya.

5. Nilai IPA

Nilai IPA sebesar 2,31 dengan capaian 77%.

Analisis: Pengelolaan BMN secara umum telah berjalan baik, terutama pada aspek:

- a. Penatausahaan BMN;
- b. Administrasi BMN;
- c. Pengawasan dan pengendalian BMN.

Namun optimalisasi pemanfaatan aset dan realisasi PNBK pengelolaan aset masih perlu ditingkatkan.

BAB IV

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

A. Analisis Efektivitas Kinerja

Secara umum capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dengan baik. Mayoritas indikator kinerja utama mampu mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Hal tersebut terlihat dari:

1. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu melampaui target;
2. Seluruh layanan administrasi perkara mencapai 100%;
3. Penggunaan e-Court mencapai 100%;
4. Nilai IKM melampaui target;
5. Nilai IKPA berada pada kategori sangat baik.

Efektivitas pelaksanaan kegiatan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- a. koordinasi internal yang berjalan baik;
- b. monitoring berkala terhadap progres pelaksanaan kegiatan;
- c. optimalisasi layanan berbasis teknologi informasi;
- d. meningkatnya kedisiplinan administrasi pelaksanaan kegiatan;
- e. komitmen unit kerja terhadap pencapaian target kinerja.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian, khususnya pada aspek capaian rincian output dan efektivitas pelaksanaan anggaran yang masih berada pada tahap progres awal tahun.

B. Analisis Efisiensi Kinerja

Dari aspek efisiensi, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran secara umum telah berjalan sesuai ketentuan. Hal ini terlihat dari:

1. Tidak adanya pengurangan akibat dispensasi SPM;
2. Pengelolaan UP/TUP yang optimal;
3. Pengendalian revisi DIPA yang baik;
4. Deviasi Halaman III DIPA yang terkendali.

Namun pada aspek NKPA, nilai efisiensi masih belum optimal karena:

1. Efisiensi SBK belum terbentuk secara signifikan;
2. Sebagian kegiatan masih berada pada tahap pelaksanaan awal;
3. Penilaian aplikasi bersifat progresif dan menggunakan target kumulatif triwulanan.

Berdasarkan ketentuan PER-5/PB/2024, nilai NKPA dipengaruhi oleh dua aspek utama yaitu efektivitas dan efisiensi. Pada awal tahun anggaran, komponen efektivitas yang diukur melalui capaian rincian output (RO) cenderung masih rendah karena pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya terealisasi.

Kondisi tersebut menyebabkan nilai NKPA belum maksimal meskipun secara substansi pelaksanaan kegiatan masih berjalan sesuai tahapan.

C. Analisis Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Kualitas pelaksanaan anggaran menunjukkan hasil sangat baik. Nilai IKPA DIPA 01 sebesar 95,63 dan IKPA DIPA 05 sebesar 94,68 menunjukkan tata kelola pelaksanaan anggaran telah berjalan efektif dan akuntabel.

Indikator yang memberikan kontribusi positif terhadap capaian IKPA antara lain:

1. Revisi DIPA sebesar 100;
2. Deviasi Halaman III DIPA sebesar 100;
3. Pengelolaan UP/TUP sebesar 100;
4. Penyelesaian tagihan tepat waktu;
5. Tidak terdapat pengurangan nilai akibat dispensasi SPM.

Meskipun demikian, pada awal Triwulan I nilai penyerapan anggaran sempat menunjukkan deviasi terhadap target periodik aplikasi. Kondisi ini dipengaruhi penggunaan target kumulatif triwulanan sebagaimana parameter dalam PER-5/PB/2024.

Dengan demikian, capaian penyerapan pada bulan berjalan lebih tepat dipandang sebagai progres monitoring pelaksanaan anggaran dan belum sepenuhnya mencerminkan kualitas capaian akhir triwulan.

D. Analisis Kinerja Kepaniteraan

Kinerja kepaniteraan menunjukkan capaian sangat baik dengan rata-rata capaian sasaran kinerja sebesar 98,32%.

1. Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

Capaian indikator sebesar 91,58% menunjukkan bahwa penyelesaian perkara telah memenuhi target tahunan sebesar 91%. Walaupun pada bulan Februari capaian sempat turun menjadi 50%, namun kondisi tersebut dapat diperbaiki pada bulan Maret sehingga capaian kumulatif triwulan tetap melampaui target.

Hal ini menunjukkan:

- a. Pengendalian penyelesaian perkara berjalan efektif;
- b. Koordinasi kepaniteraan cukup baik;
- c. Terdapat kemampuan penyesuaian dan percepatan penyelesaian perkara.

2. Administrasi Perkara dan Putusan

Seluruh indikator administrasi perkara memperoleh capaian 100%, meliputi:

- a. Pengiriman salinan putusan;
- b. Penyampaian amar putusan;
- c. Pengunggahan putusan pada direktori putusan.

Capaian tersebut menunjukkan:

- 1) Kepatuhan terhadap standar pelayanan;
- 2) Optimalisasi administrasi perkara;
- 3) Meningkatnya transparansi layanan peradilan.

3. Implementasi *e-Court*

Penggunaan *e-Court* sebesar 100% menunjukkan transformasi digital layanan peradilan berjalan optimal.

Implementasi *e-Court* memberikan dampak positif berupa:

- a. Percepatan layanan administrasi perkara;
- b. Efisiensi proses pelayanan;
- c. Peningkatan aksesibilitas layanan;
- d. Meningkatnya kepuasan pengguna layanan.

E. Analisis Kepuasan dan Kepercayaan Publik

Nilai IKM sebesar 101,48 menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadilan berada pada kategori sangat baik.

Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian tersebut antara lain:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
2. Tersedianya layanan berbasis elektronik;
3. Kecepatan pelayanan administrasi;
4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan.

Selain itu, nilai IPAK sebesar 100 menunjukkan persepsi publik terhadap integritas layanan pengadilan berada pada kategori sangat baik.

Capaian ini menunjukkan implementasi pembangunan Zona Integritas dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan berjalan efektif dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat.

F. Analisis Pengelolaan BMN dan IPA

Nilai IPA sebesar 2,31 dengan capaian 77% menunjukkan pengelolaan BMN secara umum telah berjalan cukup baik.

Aspek yang telah berjalan optimal meliputi:

- a. Penatausahaan BMN;
- b. Administrasi BMN;
- c. Pengawasan dan pengendalian BMN.

Namun demikian, masih diperlukan optimalisasi pada:

1. pemanfaatan aset negara;

2. peningkatan realisasi PNBP pengelolaan aset;
3. penguatan monitoring pengelolaan BMN.

Apabila optimalisasi pengelolaan aset dapat ditingkatkan secara konsisten, maka nilai IPA berpotensi meningkat pada triwulan berikutnya.

G. Analisis Tren Capaian Kinerja Triwulan I

Secara umum tren capaian kinerja Triwulan I menunjukkan pola progresif dan stabil.

1. Indikator layanan kepaniteraan cenderung stabil pada nilai maksimal.
2. IKPA menunjukkan peningkatan signifikan dari Januari hingga Maret.
3. NKPA menunjukkan tren kenaikan meskipun masih berada pada tahap akumulasi progres.
4. Kepuasan masyarakat menunjukkan tren positif.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa:

- a. Pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai perencanaan;
- b. Sistem pengendalian internal cukup efektif;
- c. Kualitas tata kelola organisasi terus mengalami peningkatan.

H. Analisis Risiko Kinerja

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan I masih terdapat beberapa risiko yang berpotensi mempengaruhi capaian kinerja organisasi, antara lain:

1. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan akibat proses administrasi awal tahun;
2. Rendahnya capaian RO pada awal periode pelaksanaan;
3. Risiko keterlambatan penyerapan anggaran;
4. Risiko belum optimalnya efisiensi penggunaan anggaran berbasis SBK;
5. Risiko fluktuasi capaian indikator layanan apabila terjadi peningkatan beban perkara.

Untuk memitigasi risiko tersebut, diperlukan:

- a. Monitoring berkala terhadap progres kegiatan;

- b. Percepatan pelaksanaan kegiatan prioritas;
- c. Penguatan koordinasi antar unit kerja;
- d. Pengendalian internal secara berkelanjutan;
- e. Evaluasi bulanan terhadap capaian indikator kinerja.

I. Analisis Prospek Capaian Triwulan II

Berdasarkan tren capaian pada Triwulan I, prospek pencapaian target kinerja pada Triwulan II diperkirakan masih berada pada jalur yang positif (*on track*).

Hal tersebut didukung oleh:

- 1. stabilitas capaian layanan kepaniteraan;
- 2. Kualitas pelaksanaan anggaran yang baik;
- 3. Peningkatan tren nilai ikpa;
- 4. Penguatan implementasi layanan berbasis digital;
- 5. Meningkatnya kualitas pengendalian internal.

Dengan percepatan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II, diharapkan:

- a. Capaian RO meningkat signifikan;
- b. Nilai NKPA mengalami kenaikan;
- c. Penyerapan anggaran menjadi lebih optimal;
- d. Kualitas layanan publik tetap terjaga.

BAB V

PERMASALAHAN, HAMBATAN, TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI

A. Permasalahan dan Hambatan

1. Nilai NKPA Belum Optimal pada Awal Tahun Anggaran

Pada Triwulan I, capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) masih berada pada kategori progres awal dan belum mencapai target yang ditetapkan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya capaian rincian output (RO) pada awal pelaksanaan kegiatan serta belum terbentuknya efisiensi penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK).

Selain itu, sistem penilaian aplikasi menggunakan target kumulatif triwulanan sehingga capaian awal tahun cenderung tampak rendah meskipun pelaksanaan kegiatan masih berjalan sesuai tahapan.

Dampak

- a. Nilai efektivitas perencanaan anggaran belum maksimal;
- b. Nilai capaian kinerja organisasi pada aspek perencanaan masih rendah;
- c. Belum optimalnya kontribusi capaian output terhadap nilai NKPA.

Tindak Lanjut

- a. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan prioritas;
- b. Meningkatkan monitoring realisasi rincian output secara berkala;
- c. Melakukan evaluasi bulanan terhadap progres NKPA;
- d. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal rencana aksi.

Rekomendasi

- a. Memperkuat koordinasi antar unit kerja dalam percepatan capaian output;
- b. Meningkatkan efektivitas monitoring terhadap progres kegiatan;
- c. Mengoptimalkan dokumentasi eviden capaian rincian output.

2. Penyerapan Anggaran Masih Bersifat Bertahap

Pada awal tahun anggaran, realisasi penyerapan anggaran masih berlangsung secara bertahap mengikuti jadwal pelaksanaan kegiatan dan proses administrasi pelaksanaan anggaran.

Kondisi ini menyebabkan capaian indikator penyerapan pada aplikasi monitoring belum optimal apabila dibandingkan dengan target periodik kumulatif.

Dampak

- a. Nilai progres penyerapan anggaran belum maksimal;
- b. Potensi deviasi terhadap target periodik aplikasi monitoring;
- c. Risiko keterlambatan realisasi kegiatan apabila tidak dilakukan percepatan.

Tindak Lanjut

- a. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan yang telah siap dilaksanakan;
- d. Menyesuaikan realisasi kegiatan dengan rencana penarikan dana;
- b. Meningkatkan monitoring realisasi anggaran secara mingguan.

Rekomendasi

- a. Mengoptimalkan pengendalian pelaksanaan anggaran sejak awal tahun;
- b. Meningkatkan koordinasi dengan pejabat pelaksana kegiatan;
- c. Melakukan mitigasi risiko keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

3. Efisiensi SBK Belum Terbentuk Secara Optimal

Pada Triwulan I, efisiensi penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) belum terbentuk secara signifikan karena sebagian besar kegiatan masih berada pada tahap awal pelaksanaan.

Kondisi tersebut menyebabkan kontribusi aspek efisiensi terhadap nilai NKPA belum optimal.

Dampak

- a. Nilai efisiensi perencanaan anggaran masih rendah;
- b. Kontribusi komponen efisiensi terhadap NKPA belum maksimal.

Tindak Lanjut

- a. Melakukan pengendalian penggunaan anggaran berbasis kebutuhan prioritas;
- b. Mengoptimalkan efisiensi pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi kualitas output;
- c. Melakukan monitoring penggunaan SBK secara berkala.

Rekomendasi

- a. Meningkatkan efektivitas pengendalian biaya kegiatan;

- b. Melakukan evaluasi efisiensi penggunaan anggaran pada setiap akhir triwulan;
- c. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efisien dan akuntabel.

4. Fluktuasi Capaian Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

Pada bulan Februari terjadi penurunan capaian penyelesaian perkara tepat waktu dibandingkan bulan lainnya. Meskipun secara kumulatif target triwulan tetap tercapai, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan pengendalian terhadap penyelesaian perkara.

Dampak

- a. Potensi ketidakstabilan capaian indikator pelayanan perkara;
- b. Risiko keterlambatan penyelesaian perkara pada periode tertentu.

Tindak Lanjut

- a. Melakukan monitoring penyelesaian perkara secara berkala;
- b. Memperkuat koordinasi internal kepaniteraan;
- c. Melakukan evaluasi terhadap perkara yang berpotensi melewati batas waktu penyelesaian.

Rekomendasi

- a. Mengoptimalkan pengendalian administrasi perkara;
- b. Memperkuat monitoring terhadap perkara prioritas;
- c. Meningkatkan efektivitas koordinasi penyelesaian perkara.

5. Optimalisasi Pengelolaan BMN dan IPA Masih Perlu Ditingkatkan

Meskipun pengelolaan BMN secara umum telah berjalan baik, namun optimalisasi pemanfaatan aset dan realisasi PNBPN pengelolaan aset masih memerlukan peningkatan.

Dampak

- a. Nilai IPA belum mencapai target optimal;
- b. Pemanfaatan aset negara belum maksimal.

Tindak Lanjut

- a. Melakukan inventarisasi dan monitoring pemanfaatan BMN;

- b. Meningkatkan pengendalian administrasi BMN;
- c. Mengoptimalkan pengawasan pengelolaan aset.

Rekomendasi

- a. Meningkatkan efektivitas pemanfaatan BMN;
- b. Melakukan evaluasi berkala terhadap pengelolaan aset;
- c. Mengoptimalkan pengelolaan PNBPN dari aset negara.

B. Upaya Perbaikan dan Strategi Penguatan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada triwulan berikutnya, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala;
2. Meningkatkan koordinasi antar unit kerja dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Melakukan percepatan realisasi kegiatan prioritas;
4. Mengoptimalkan pengendalian pelaksanaan anggaran;
5. Memperkuat implementasi layanan berbasis teknologi informasi;
6. Meningkatkan kualitas pengendalian internal organisasi;
7. Mengoptimalkan dokumentasi eviden capaian kinerja;
8. Memperkuat implementasi pembangunan Zona Integritas dan SMAP.

C. Rencana Aksi Triwulan II

No	Rencana Aksi	Target	Penanggung Jawab
1	Percepatan pelaksanaan kegiatan prioritas	Meningkatnya capaian RO	Seluruh Unit Kerja
2	Monitoring bulanan IKPA dan NKPA	Peningkatan nilai indikator	Kesekretariatan
3	Penguatan pengendalian penyelesaian perkara	Stabilitas capaian layanan	Kepaniteraan
4	Optimalisasi penggunaan anggaran	Peningkatan efisiensi SBK	Pengelola Keuangan

5	Penguatan layanan berbasis digital	Peningkatan kepuasan publik	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
6	Monitoring pengelolaan BMN	Peningkatan nilai IPA	Subbag Umum dan Keuangan
7	Penguatan pengendalian internal	Mitigasi risiko kinerja	Pimpinan dan Unit Terkait

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merupakan bagian dari upaya pengendalian dan peningkatan kualitas tata kelola organisasi dalam rangka mendukung implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan, secara umum capaian kinerja organisasi menunjukkan hasil yang baik. Mayoritas indikator kinerja pada unsur kepaniteraan telah mencapai target yang ditetapkan, terutama pada indikator pelayanan administrasi perkara, penggunaan layanan e-Court, penyampaian putusan, serta transparansi layanan peradilan.

Pada aspek pelayanan publik, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) menunjukkan hasil sangat baik, yang mencerminkan meningkatnya kualitas pelayanan serta kepercayaan masyarakat terhadap integritas layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Sementara itu, pada aspek pengelolaan anggaran, capaian IKPA menunjukkan kualitas pelaksanaan anggaran berada pada kategori sangat baik. Namun demikian, nilai NKPA masih memerlukan optimalisasi karena dipengaruhi capaian rincian output dan efisiensi SBK yang masih berada pada tahap progres awal tahun anggaran.

Berbagai hambatan dan permasalahan yang ditemukan selama Triwulan I pada dasarnya masih dapat dikendalikan dan ditindaklanjuti melalui penguatan monitoring, percepatan pelaksanaan kegiatan, peningkatan koordinasi antar unit kerja, serta penguatan pengendalian internal organisasi.

Melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, diharapkan seluruh unit kerja dapat terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan sehingga target kinerja tahunan dapat tercapai secara optimal, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Demikian laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 ini disusun sebagai bahan evaluasi, pengendalian, dan pengambilan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas kinerja organisasi pada periode berikutnya.

LAMPIRAN

**MONITORING REALISASI KINERJA SAKIP KEPANITERAAN TRIWULANAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TAHUN 2026**

Tujuan 1: Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target (%)	REALISASI KINERJA TRIWULAN I											
				J a n u a r i			F e b r u a r i			M a r e t					
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1) Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	91	Jumlah perkara yang diselesaikan	3	4	3	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	3	2	3	Realisasi	100	50	100
				Jumlah perkara yang diputus	3	4	3	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu	3	4	3	Realisasi	100	100	100
				Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju	4	4	9	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu	4	4	9	Realisasi	100	100	100
		4) Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	Jumlah putusan yang telah diminutasi	3	4	3	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan	3	4	3	Realisasi	100	100	100
				Jumlah putusan tata usaha negara yang dimohonkan eksekusi	n/a	n/a	n/a	Jumlah permohonan eksekusi putusan tata usaha negara yang diselesaikan	n/a	n/a	n/a	Realisasi	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
				Jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan	4	7	5	Jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court	4	7	5	Realisasi	100	100	100
		5) Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	90	Jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan	4	7	5	Jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court	4	7	5	Realisasi	100	100	100
				Jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	4	7	5	Jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	4	7	5	Realisasi	100	100	100
				Jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	4	7	5	Jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	4	7	5	Realisasi	100	100	100
		2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1) Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	98	IKM =====>	98,90			99,45			101,48		
						IPAK =====>	100,00								



Serang, 20 April 2026
Panitera,
ASWIRMAN, S.H. M.H.
NIP. 19720715 199203 1 003


REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026


Sasaran Kinerja 1: Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			Rata-Rata Realisasi	Capaian	Capaian SasKin 1
			Jan	Feb	Mar			
1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	91	100	50	100	83,33	91,58	98,32
1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100	100	100,00	100,00	
1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	100	100,00	100,00	
1.4	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100	100	100,00	100,00	
1.5	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	90	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
1.6	Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100	100	100	100	100,00	100,00	

Sasaran Kinerja 2: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Rata-Rata Realisasi	Capaian SasKin 2
			Triwulan I			
2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	98	IKM	98,90	99,45	101,48
			IPAK	100,00		



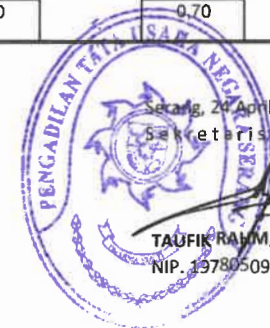
 Serang, 20 April 2026
 Panitera,

 ASWIRMAN, S.H. M.H.
 NIP. 19720715 199203 1 003

**MONITORING REALISASI KINERJA SAKIP KESEKRETARIATAN TRIWULANAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TAHUN 2026**

Tujuan ke-2 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern dan Profesional

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan I							Nilai Realisasi adalah nilai bulan pelaporan terakhir	Capaian	Status	
				Nilai Aspek & Indikator Aspek		Jan	Feb		Mar					
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	81	Kualifikasi		22,82	Nilai IPASN Jan 80,22	22,82	Nilai IPASN Feb 80,22	22,82	Nilai IPASN Mar 80,22	80,22	99,04	Memenuhi Target Tahapan (Low-Target). Namun target masih sangat moderat.
				Kompetensi		30,22		30,22		30,22				
				Kinerja		23,91		23,91		23,91				
				Disiplin		5		5		5				
	3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA-01	96	Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	100,00	Nilai IKPA Jan 78,98	100,00	Nilai IKPA Feb 93,68	100,00	Nilai IKPA Mar 95,63	95,63	99,61	Sesuai Target Tahapan, karena dipengaruhi target yang termasuk moderat
					Deviasi Hal II DIPA	100,00		100,00		100,00				
				Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan	53,65		87,55		100,00				
					Belanja Kontraktual	100,00		100,00		100,00				
					Penyelesaian	n/a		100,00		100,00				
					Pengelolaan UP & TUP	100,00		100,00		100,00				
				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	65,00		76,67		82,50				
				Dispensasi SPM (Pengurangan)		0,00		0,00		0,00				
	3.3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA-05	95	Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	100,00	Nilai IKPA Jan 57,95	100,00	Nilai IKPA Feb 93,78	100,00	Nilai IKPA Mar 94,68	94,68	99,66	Sesuai Target Tahapan, karena dipengaruhi target yang termasuk moderat
					Deviasi Hal II DIPA	100,00		100,00		100,00				
				Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan	0,00		100,00		100,00				
					Belanja Kontraktual	n/a		n/a		100,00				
					Penyelesaian	n/a		100,00		100,00				
					Pengelolaan UP & TUP	100,00		100,00		100,00				
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran				Capaian Output	45,44	79,20		80,86						
Dispensasi SPM (Pengurangan)					0,00	0,00		0,00						
3.4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA-01	96	Efektivitas	Capaian Rincian Output	0,00	Nilai NKPA Jan 0,00	25,00	Nilai NKPA Feb 18,75	50,00	Nilai NKPA Mar 37,50	37,5	39,06	Baik (On Track)	
			Efisiensi	Penggunaan SBK	0,00		0,00		0,00					
				Efisiensi SBK	n/a		n/a		n/a					
3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA-05	91	Efektivitas	Capaian Rincian Output	0,00	Nilai NKPA Jan 0,00	4,59	Nilai NKPA Feb 13,44	6,38	Nilai NKPA Mar 14,79	14,79	16,25	Tahap Akumulasi Progres Berkelanjutan	
			Efisiensi	Penggunaan SBK	0,00		100,00		100,00					
				Efisiensi SBK	n/a		n/a		n/a					

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan I						Nilai Realisasi adalah nilai bulan pelaporan terakhir	Capaian	Status
				Nilai Aspek & Indikator Aspek		Jan	Feb	Mar				
		3.6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	Pengelolaan BMN yang Akuntabel & Produktif Penatausahaan BMN Realisasi PNBP dari Pengelolaan Aset	0,80 0,37	0,80 0,37	0,80 0,37	0,80 0,37	2,31	77,00	Tahap Akselerasi Administrasi
					Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-Undangan	0,14	0,14	0,14	0,14			
					Pengawasan dan Pengendalian BMN yang Efektif	0,30	0,30	0,30	0,30			
					Administrasi BMN yang Andal	0,70	0,70	0,70	0,70			



Serang, 24 April 2026
 Sekretaris

TAUFIK RAHMAN, S.Sos., M.M.
 NIP. 19780509 200604 1 002